

Bab IV

Faktor-faktor Pendorong bagi Khatami Melaksanakan Demokratisasi di bawah Otoritas Doktrin Vilayat-I Faqih

Mengikuti perkembangan peradaban 'Demokratisasi di bawah otoritas *Vilayat-I Faqih*' tidak akan menjadi sesuatu yang difikir mustahil, gelombang ketiga telah berusaha mewujudkannya dengan lahirnya negara-negara demokrasi baru di kawasan yang dikira mustahil untuk mengembangkannya, seperti halnya Timur Tengah. Namun kenyataannya telah banyak bermunculan negara-negara dengan daya yang besar untuk mewujudkan demokrasi di kawasan ini. Hanya saja bentuk dari demokrasi itu sendiri berbeda-beda di tiap negara yang mempraktekkan sistem ini.

Iran salah satunya yang memiliki kultur relatif serupa dengan negara-negara yang sekawasan dengannya, namun dalam bentuk mewujudkan demokratisasinya memiliki kecenderungan yang tidak sama dengan negara-negara lainnya. *Vilayat-I Faqih* yang sangat menjadikannya berbeda. Mengagungkan doktrin ini dengan cara setia menggunakan dan mengaplikasikan dalam kehidupan pemerintahan negaranya membuat Iran memiliki identitas yang kuat dimata negara-negara lain.

Khatami adalah salah satu tokohnya, sebagai pejuang demokrasi kerakyatan yang menumpukan rakyat sebagai acuan segala kebijakan pemerintahannya, meski begitu ia tidak pernah dengan sengaja maupun tidak berusaha tidak mematuhi sang *faqih* yang telah dipilih sebagai pemimpin spiritual negara tersebut. Dengan kecerdasan dan rasa nasionalismenya ia tetap berusaha menjalankan demokratisasi seperti yang diimpikannya bersama mayoritas rakyatnya dengan tidak meninggalkan tradisi bangsanya.

A. Faktor Kultural

Faktor kultural seperti yang dipaparkan pada bab kedua sebagai bentuk identitas negara Iran dan bangsa Persi menjadi latar belakang tiap tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh Khatami. Ini terbukti pada tiap momentum yang menyangkut Iran dan Khatami seperti dijelaskan sebelumnya, tidak satu tindakanpun yang membuat Khatami lepas kendali dengan membuat dan melaksanakan kebijakannya bertentangan dengan doktrin *Vilayat-I Faqih*. Sebagai seorang muslim yang taat dan juga sebagai murid guru besar Imam Khomeini, Khatami dimasa pemerintahannya selalu menggunakan acuan Al-Qur'an dan As-sunnah sebagai pedoman untuk menetapkan kebijakan dan atau melaksanakannya.

Disinilah letak proses dialektika antara tradisi Demokrasi dan tradisi Iran yang diadopsi Khatami sebagai dasar pemikirannya. Tesis yang telah ada mengatakan bahwa *Vilayat-I Faqih* yang dimiliki Iran sebagai dasar konstitusi tidak sejalan dengan cita-cita Demokrasi, namun sebuah anti-tesis menyatakan bahwa Iran adalah negara Islam yang beridentitas kuat terhadap nilai-nilai tradisi Persia yang tidak mungkin dihilangkan, hingga kemudian dalam pemikiran Khatami melahirkan sebuah sintesis bahwa, akulturasi dari dua variabel diatas bisa dilaksanakan, dengan tetap menjalankan proyek demokrasi tanpa melupakan ataupun melepaskan identitas negaranya dari nilai-nilai tradisi yang telah ada, yang akhirnya justru melahirkan wujud demokrasi baru, demokrasi yang sejalan dengan cita-cita revolusi yaitu *Vilayat-I faqih*

Tidak ada bentuk pemerintahan, apa pun yang dasar-dasar ideologis atau konfigurasi sosial ekonominya dapat disebut “demokratis” dengan pengertian yang kita pahami sekarang ini, tanpa didasarkan pada sejumlah prinsip yang tersirat dalam sikap dan nilai-nilai sosial rakyatnya, atau tersurat secara resmi dalam undang-undangnya. Yang terpenting dari prinsip-prinsip itu, adalah pengakuan atas martabat setiap manusia tanpa memandang kualitas-kualitasnya, pengakuan atas perlunya hukum, yaitu himpunan norma-norma yang pasti atau rasional, untuk mengatur semua hubungan sosial, kesamaan semua warga negara di hadapan hukum, tanpa memandang ras, suku dan kelompok, dapat dibenarkannya keputusan-keputusan negara atas dasar persetujuan rakyat, dan tingkat toleransi yang tinggi terhadap pendapat-pendapat yang tidak konvensional dan tidak ortodoks. pemilihan umum multipartai, dan aturan konstitusi adalah bagian dari “pemikiran Islam baru” yang akar-akar dan legitimasinya terdapat dalam suatu interpretasi yang segar atau reinterprestasi sumber-sumber Islam. Imam Khomeini bahkan pernah melontarkan istilah “*Islamic democracy*”. Pada bagian lain, Imam Khomeini mengatakan bahwa memikul fungsi pemerintahan tidaklah menunjukkan status atau kelebihan kehormatan. Fundamentalisme dan radikalisme sepanjang hanya pada tataran pemikiran, jelas bukan merupakan ancaman terhadap demokrasi. Ia baru mengancam demokrasi ketika radikalisme sudah menjurus pada aksi-aksi kekerasan yang menimbulkan

korban di kalangan warga sipil. Namun, kekerasan serupa yang dilakukan institusi negara dengan mengatasnamakan demokrasi.¹

Tanpa menutup mata terhadap berbagai problematik yang bisa muncul termasuk hak minoritas non Muslim dapat disimpulkan, sebenarnya secara teoretis negara berdasar syariah lebih bersifat nomokratik (berpusat hukum dan undang-undang), ketimbang teokratik. Bahkan, berkat kelenturan (penafsiran) hukum Islam, ia praktis bisa menampung sistem politik apa pun, termasuk demokrasi. Dengan kata lain, otoritarianisme tak mesti merupakan unsur intrinsik di dalamnya. Hal ini berlaku baik di kalangan Sunni maupun Syiah.²

Kecintaan Khatami pada bangsanya dan para pendukungnya menjadikan beberapa kebijakan Khatami memang sangat berbau kerakyatan, Khatami menyadari bahwa pemerintahan Islam yang baik adalah pemerintahan yang mementingkan kepentingan bersama yaitu kepentingan rakyatnya bukan kepentingan seorang saja, ia menekankan perlunya konsensus dan perjanjian antara penguasa dan yang dikuasainya³. Khatami dengan sangat terbuka menyatakan bahwa rakyat Iran berhak untuk menterjemahkan *faqih* sesuai dengan perkembangan zaman, dan pemahaman yang benar menurut mereka, bagaimanapun hal tersebut telah menjadi kesepakatan bersama sebagai Konstitusi negara Iran⁴. Nilai dan etika yang

¹ Riza Sihbudi, *Islam, Radikalisme, dan Demokrasi*, dalam http://www.swaramuslim.net/more.php?id=2331_0_1_0_m

² Haidar Bagir, *Tidak Ada : Teokrasi dalam Politik Islam*, artikelnya sebagai direktur utama penerbit Mizan, tanpa tahun

³ Baca Bambang Cipto, *Dinamika Politik Iran*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hal.48-51

⁴ *ibid.*,

diajarkan Islam sebagai sebuah kewajiban di negara tersebut dirasakan cukup bagi Khatami untuk menilai bahwa rakyat cukup dewasa dan adil dalam menilai dimana kebenaran dan nilai murni yang dapat diambil dari doktrin *Vilayat-I Faqih* yang telah diciptakan oleh pendahulu mereka Imam Khomeini yang sangat mereka cintai itu.

Disinilah letak Asian Values yang pernah dipaparkan Clark D. Neher dan Ross Marlay dalam *Asian Style Democracy*, bahwa nilai sebuah identitas dianggap paling utama untuk menggambarkan bagaimana wujud negaranya sebenarnya. Dalam *Asian Style Democracy* ada beberapa model bentuk negara demokrasi, karena antara negara satu dengan lainnya tidak tentu sama tetapi pola dasarnya memiliki karakteristik yang serupa, elemen-elemen yang mendasari yaitu; *Confucianism, patron-client communitarianism, personalism, authority, dominant political party dan strong state*.⁵

Bila meletakkan Khatami sebagai subyek, maka kita bisa membaca negara Iran dengan pendekatan Personalism Style, dimana kuatnya pengaruh kharisma seorang pemimpin bisa membantu arah demokrasi. Diistilahkan Khatami sebagai busur dan anak panahlah sebagai anak panahnya.

B. Faktor Eksternal

Dan kemudian, dengan menyadari bahwa *Vilayat-I Faqih* merupakan identitas negara Iran yang teraplikasi dalam konstitusinya, Khatami sebagai seorang pemimpin pemerintahan, dapat dilihat dari beberapa kebijakan atau

⁵ lihat dalam Clark D. Neher and Ross Marlay, *Democracy and Development in Southeast Asia: The Winds of Change*, Colorado, Westview Press, 1995. hal. 13-23

rencana program pemerintahannya berusaha untuk mensejajarkan negaranya dengan negara-negara lainnya secara layak. Ini terbukti seperti disebutkan diatas dengan adanya proyek 'dialog antar peradaban'. Khatami menyadari sebagai seorang intelektual yang juga pernah mengenyam kehidupan belajar diluar negeri bahwa peradaban sangat menentukan jalannya kehidupan bernegara. Bila ingin negaranya maju keserataan dan pengakuan dari negara lain sangat penting bagi negara tersebut. Karena faktor tersebutlah yang akhirnya membuat Khatami mengkombinasikan doktrin negaranya yang sangat anti-barat dengan demokratisasi yang sangat dekat dengan semua negara luar termasuk barat.

Bagi Khatami untuk tetap mematuhi prinsip negaranya, ia tidak pernah berniat maupun berusaha mengubah wujud konstitusinya meski ia tetap memperjuangkan demokratisasi bagi negaranya. Syarat demokratisasi salah satunya adalah masuk lingkungan global sehingga penting kiranya untuk membangun hubungan baik dengan negara lain. Khatami dengan kebijakannya 'dialog peradaban' ingin agar bangsanya dikenal juga diakui sebagai bangsa yang memiliki ciri tersendiri bukan merupakan bangsa adopsi seperti kebanyakan negara demokrasi pada umumnya.

Kiranya penting bagi Khatami untuk melakukan upaya diplomasi dengan semua negara yang ada didunia, untuk memperoleh pengakuan bahwa Iran juga negara yang beradab dan cinta damai.

Usaha-usaha Khatami untuk membuktikan bahwa dirinya ingin memperjuangkan jembatan 'dialog antar peradaban' serta ingin menciptakan

perdamaian mondial telah dibuktikan dengan, misalnya, mengadakan pertemuan dengan Paus Yohanes Paulus II di Vatikan, Sekjen PBB Kofi Annan, dan belakangan dengan Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer.⁶

Khatami selama ini dikenal sebagai presiden pertama Iran yang berani melemparkan gagasan-gagasan seputar pembaruan tradisi, yang sebelumnya sangat tabu. Ia juga pernah mengangkat isu-isu “kontroversial” seperti penegakan hak-hak asasi manusia (HAM), hak-hak wanita, pluralisme budaya, toleransi dan demokratisasi, yang semuanya belum pernah dibicarakan secara terbuka oleh Presiden Iran sebelumnya. Selain gagasan-gagasan itu, ada satu isu penting yang dilemparkan Khatami yang dianggap sebagai upaya meraih cita-cita membangun dialog antarperadaban, yakni isu menjalankan politik *détente*.

Setelah kemenangannya pada pemilu 1997, Khatami langsung bersedia diwawancarai *CNN*. Ia tercatat sebagai presiden Iran pertama sejak revolusi tahun 1979 yang mengunjungi negara Barat (Italia, Jerman dan Perancis) dan markas besar PBB di New York, serta menemui Paus Yohanes Paulus II di Vatikan. Ia melontarkan ide dialog peradaban dan kebijakan menghilangkan hubungan tegang yang mendapat sambutan sangat positif dari negara-negara barat dan Arab⁷.

Kunjungan Presiden Khatami ke Eropa Barat dan pertemuannya dengan Paus Yohannes Paulus II tersebut terjadi berkat kesadaran dari kedua

⁶ Ismatillah A Nu'ad *Khatami dan Harapan Dialog Antarperadaban* Editor pusat studi lintas agama, Lintasan Kalam-Linka, Jakarta, dalam www.linka.com

⁷ www.kompas.com

pihak akan pentingnya komunikasi dua arah secara dialogis serta menyingkirkan jauh-jauh rasa saling curiga yang menghinggapi mereka selama dua puluh tahun terakhir ini. Lawatan itu disebut-sebut mendorong sebuah “Dialog Peradaban” yang diserukan Khatami dengan seterunya dari Barat. Ia memilih Italia sebagai pijakan kunjungan pertama untuk membuktikan bahwa ia serius tentang niatnya menciptakan dialog dengan peradaban lainnya, ini dikarena bobotnya secara spiritual dan secara ekonomi potensial.⁸

Presiden Khatami pun tidak pernah langsung mengecam proses perdamaian Timur Tengah yang sangat ditentang Iran sejak Konferensi Madrid tahun 1991. Bahkan, ia menyambut hangat Presiden Palestina Yasser Arafat ketika menghadiri KTT OKI di Teheran bulan Desember 1997. Sebaliknya bagi Khatami, kunjungannya ke Italia dan Perancis saat ini memperoleh keuntungan berupa kesediaan Uni Eropa menjalin kontak langsung dengan Republik Islam Iran sebagai mitra pergaulan. Hal ini tidak pernah dicapai oleh pendahulu Khatami.

Khatami kini mencoba mencari devisa lewat penjualan minyak dengan harga khusus ke Italia dan Perancis. Ia menawarkan menjual minyak dengan harga 8,5 dollar AS per barrel, yakni di bawah 15 persen dari harga pasar, hingga tahun 2005 kepada Perancis dan Italia. Namun itu dengan imbalan, Khatami akan meminta Italia dan Perancis memberi kredit lunak sekitar 2,5 milyar dollar AS.

⁸ dalam http://www.swaramuslim.net/more.php?id=2331_0_1_0_m

Hubungan saling menguntungkan antara Iran dengan dunia Barat itu akan menjadi pemicu utama terus terjalannya dialog dalam berbagai sektor, termasuk pula dialog peradaban.⁹

Iran pada era Khatami hanya belum bisa memulihkan hubungan dengan AS. Halangan utama soal hubungan dengan AS adalah penolakan Washington untuk mundur dan mencabut sanksi sepihak pada republik Islam itu. Kedua negara itu memutuskan hubungan setelah penyanderaan di Kedubes AS di Teheran tahun 1979, dan upaya-upaya untuk pendekatan terhalang oleh ketidaksukaan akan dukungan AS pada Israel dan pada rezim Kerajaan Iran yang digulingkan tahun 1979. Sebenarnya, hubungan Iran-AS sudah mulai retak setelah revolusi Islam yang menggulingkan Shah Iran yang pro-Amerika tahun 1979. Hubungan itu menjadi benar-benar rusak setelah kelompok revolusioner Iran menggempur Kedutaan Besar AS di Teheran dan menyandera stafnya.¹⁰

Belum pulihnya hubungan Iran-AS disebabkan kebijakan AS yang belum menanggalkan hegemoninya di Timur Tengah dan dukungannya yang membabi buta terhadap Israel. Sedangkan Iran tetap komitmen mendukung hak-hak rakyat Palestina. Salah satu fokus kebijakan politik luar negeri Iran di tingkat regional, adalah menyangkut konteks isu Palestina itu.

Prinsip Iran Dalam Menjalankan Politik Luar Negerinya adalah Perluasan hubungan dengan negara-negara tetangga dan penguatan hubungan dengan negara-negara Islam adalah salah satu prioritas dalam kebijakan

⁹ Kompas, Jum'at 12 Maret 1999

¹⁰ Kompas, 19 April 1999

politik luar negeri Iran. Bahwa peniadaan hubungan Iran dengan AS adalah masalah yang sudah sepenuhnya argumentatif dan diputuskan secara profesional. "Hakikat persoalan ini akan jelas apabila masalah perundingan dan hubungan dengan AS disorot dengan tinjauan yang berpijak pada kewibawaan dan kehormatan martabat bangsa Iran dan masa depan negara.

Adalah realitas yang tidak bisa dipungkiri bahwa menjalin suatu hubungan tanpa mengindahkan prinsip dan nilai adalah kata lain dari ketaklukan di depan musuh, penghapusan masa depan yang cerah, dan pemutusan pengaruh revolusi Islam atas nasib bangsa-bangsa Muslim.

Di tengah masyarakat dunia, Iran telah dikenal sebagai negara merdeka yang pantang tunduk di depan dominasi asing dan menjadi sebuah model sebuah pemerintahan agamis yang berbasiskan kerakyatan. Politik luar negeri Iran berprinsipkan aspirasi pemerintahan Islam tanpa mengabaikan kehormatan hak bangsa-bangsa lain dan justru sangat konsen kepada perjuangan bangsa-bangsa tertindas. Prinsip ini terus dianut oleh Iran kendati negeri Mullah ini tak pernah sepi dari rongrongan AS. Dan sekarang Iran terus menjejakkan kakinya dengan mantap di atas garis prinsip dan landasan kebijakan politik luar negerinya yang antara lain ditandai dengan perluasan hubungan dengan segenap anggota Dunia Islam serta negara-negara Eropa dan Asia.

Dengan menganut tiga prinsip kehormatan, kebijaksanaan, dan maslahat, Iran telah menjadikan norma-norma ideologis pemerintahan Islam sebagai pedoman dalam politik luar negerinya. Komitmen kepada prinsip dan

pedoman pemerintahan Islam sejak dua dekade silam ini terbukti sangat determinan dalam proses terangkatnya kredibilitas dan integritas RII. Kenyataan ini menambah kegerahan AS sehingga negara adi daya itu selalu berusaha menjegal eksistensi pemerintahan RII dalam berbagai bidang, termasuk politik luar negeri. Ide-ide semisal demokrasi agamis, dialog antarperadaban, dan koalisi untuk perdamaian dibendung sedemikian rupa oleh AS lantaran ide-ide cemerlang dan normatif RII ini mengancam hegemoni AS. Dijelaskannya nilai-nilai revolusi Islam dan pemerintahan demokratis agamis di gelanggang politik luar negeri pada hakikatnya merupakan satu keharusan bagi Iran dalam memproteksi revolusi Islamnya dari badai politik permusuhan kekuatan-kekuatan asing.¹¹

Kebijakan politik luar negeri Iran yang ditandai dengan fenomena tersebut di atas secara umum didasarkan atas strategi yang dianut pasca revolusi tahun 1979. Strategi Iran tersebut antara lain adalah, *pertama* terjaminnya jalur ekspor minyak Iran baik secara keamanan, ekonomi, maupun politik. *Kedua*, mencegah masuknya pengaruh asing di Teluk Persia. Sedangkan keamanan negara-negara setempat harus dipikul bersama oleh negara-negara tersebut. Karena itu, Iran sangat mengecam kehadiran militer barat pasca perang teluk II di Teluk Persia. *Ketiga*, menjalin hubungan spiritual dan emosional dengan penganut madzhab Shiah di negara Arab dan Islam. *Keempat*, menganut politik antizionis, dan menolak kesepakatan damai Arab-Israel. *Kelima*, mempertahankan *status quo* di Shatt Al Arab

¹¹ dalam <http://www.irib.ir/worldservice/melayuRADIO/khabar/tafsir.htm>

berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani Iran dan Irak pada tahun 1975 di Aljazair. *Keenam*, mempertahankan *status quo* di Teluk Persia, termasuk pendudukan Iran atas Pulau Abu Musa, Tumb Besar, dan Tumb Kecil. Karena itu, Iran menolak klaim Uni Emirat Arab (UEA) atas tiga pulau tersebut.¹²

Secara umum kebijakan politik luar negeri Iran antara pra dan pasca revolusi tahun 1979 tidak banyak berubah, terutama menyangkut dua isu yaitu kebijakan anti-Israel dan antipengaruh asing serta Gagasan masih berpegang teguh kepada tradisi fundamental *Vilayat-I Fakih* dan komitmennya terhadap cita-cita revolusi Islam.

Meski Presiden Khatami sampai saat ini belum pernah melakukan kunjungan kenegaraan ke negara-negara Islam, tetapi Menlu Iran Kamel Kharrazi dan Wakil Presiden Hasan Habibie sering mengadakan lawatan ke negara-negara Arab dan Islam. Hubungan Iran-Arab Saudi, sebagai salah satu negara Arab, terjalin sangat erat pada era Khatami ini.¹³

Kepemimpinan Iran dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) kini yang membawahi seluruh negara Islam yang mayoritas penganut madzhab Sunni, sama sekali tidak mengalami hambatan. Penyelenggaraan KTT OKI di Teheran Desember 1997, dinilai sangat sukses.¹⁴

Pada era Khatami, madzhab Shi'ah yang menjadi dasar filosofi negara Iran boleh jadi tidak lagi merupakan hambatan bagi merambahnya pengaruh

¹² Musthafa Abdul Rahman, *Iran Pasca Revolusi : Fenomena Pertarungan Kubu Reformis dan Konservatif*, Buku Kompas, Jakarta, 2003, hal. 172-173

¹³ *ibid.*,

¹⁴ *ibid.*, hal. 24

Iran ke negara-negara Muslim Sunni. Sebab, pemikiran modernis Khatami bisa lebih menonjol daripada bayangan madzhab Shi'ah, untuk memperoleh simpati di dunia Muslim Sunni.

Sementara hubungan Iran dan negara-negara Barat masih diwarnai beragam bentuk. Hubungan Iran dengan Perancis dan Jerman mengalami kemajuan pesat. Tetapi hubungan Iran dan AS masih seperti sedia kala. Washington tetap menerapkan kebijakan politik penangkal ganda terhadap Irak dan Iran di kawasan Teluk dan masih mempertahankan berlakunya undang-undang D'Amato yang menjatuhkan sanksi ekonomi terbatas terhadap Iran.¹⁵

Meski demikian, masyarakat internasional dan pemerintah Iran saat ini menemukan titik temu kepentingan yang paling kuat sejak meletusnya revolusi Iran dua puluh tahun silam, yaitu terus lestarynya pemerintah reformis di bawah kepemimpinan Presiden Muhammad Khatami yang berhasil memegang tampuk kekuasaan lewat pemilu tahun 1997.

Semakin kuatnya posisi Khatami, tidak hanya mempercepat proses terciptanya masyarakat Madani di Iran tetapi membantu terwujudnya stabilitas di kawasan Teluk Persia karena bisa makin tercapai saling pengertian antara penguasa di Teheran dan negara-negara tetangga Iran, khususnya negara Arab Teluk. Akhirnya dalam jangka panjang, diharapkan tercipta sistem keamanan kawasan mandiri tanpa kehadiran kekuatan asing di

¹⁵ *ibid.*,

kawasan teluk seperti yang banyak diharapkan rakyat dan pemimpin kawasan itu.

Konsep *Vilayat-I Fakh* yang menjadi fondasi sistem kenegaraan Iran pasca revolusi tetap setia dijadikan rujukan oleh semua kekuatan politik yang dominan di Iran dewasa ini, meski dengan catatan dibenarkan adanya perbedaan penafsiran atas konsep tersebut. Kondisi politik di Iran belum memungkinkan mentolerir suara yang ingin menyimpang dari konsep *Vilayat-I Fakh* yang diperkenalkan pertama kali oleh Bapak Revolusi Iran sendiri, Ayatollah Khomeini.

C. Faktor Internal

Perubahan-perubahan ke arah demokrasi dimulai dekade 1990 khususnya sejak terpilihnya Khatami sebagai presiden. Ada tiga kekuatan yang menjadi motor penggerak kehidupan demokrasi di Iran saat ini, yakni, mahasiswa, intelektual dan wanita. Ketiga kekuatan inilah yang paling mungkin diharapkan karena partai politik merupakan barang haram di Iran. Sebetulnya, dinamika perubahan Iran pada dekade 90-an juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kebijakan presiden Ali Akbar Hashemi Rafsanjani (1989-1997). Dibawah pemerintahan Rafsanjani kekerasan politik untuk sementara berkurang dibanding dekade 80-an saat pemerintahan Iran melakukan pembersihan terhadap kelompok-kelompok kiri di tengah berkecamuknya perang Irak-Iran. Rafsanjani terpilih sebagai presiden setelah perang berakhir dan dihadapkan pada kondisi ekonomi, sosial dan psikologi yang parah akibat perang yang sangat merusak berbagai sektor kehidupan

rakyat Iran. Namun, dengan tangan dingin dan cara pandangan yang pragmatis Rafsanjani menggulirkan program pembangunan ekonomi sebagai poros utama kebijakan dalam negerinya. Di bawah Rafsanjani penduduk desa semakin baik keadaan perekonomiannya. Demikian pula fasilitas pendidikan dan kesehatan di kawasan-kawasan yang jauh di pedesaan semakin meningkat dibanding pada masa pemerintahan Reza Pahlavi.¹⁶

► Mahasiswa dan Pemuda

Sementara di perkotaan semakin banyak anak muda pria dan wanita memasuki bangku kuliah. Kalangan muda perkotaan inilah yang kini menjadi motor penggerak perubahan demokrasi di Iran. secara umum mereka lebih banyak mengambil langkah-langkah moderat namun tetap kritis terhadap rejim yang berkuasa. Mereka mengkritik dominasi politik oleh para mullah. Sebaliknya, mereka mendukung presiden Khatami yang menjadi idola kalangan muda. Khatami mereka pandang memiliki visi ke depan yang bagus berkaitan dengan demokrasi Iran karena gagasan-gagasannya tentang dialog, toleransi, dan keterbukaan. Mereka menghendaki negara yang lebih toleran dan mendukung terbentuknya apa yang mereka katakana sebagai “demokrasi Islam”.¹⁷

► Kalangan Intelektual

Kalangan intelektual adalah kelompok yang juga menjadi motor penggerak perubahan demokrasi Iran. banyak di antara intelektual reformis ini merupakan pejuang-pejuang revolusioner. Kini mereka

¹⁶ Bambang Cipto, *op.cit.*, hal. 37

¹⁷ *ibid.*, hal. 38

menyadari bahwa revolusi tidak cukup sekedar dengan prinsip-prinsip mulia sebagaimana dicanangkan oleh para mullah. Mereka kini cenderung mendukung gerakan reformis politik yang sedang berkembang. Mereka bahkan mulai mempersoalkan dasar-dasar hukum dari *Vilayat-I Faqih*. Dalam pandangan Hojjatolislam Mohsen Kadivar hadis-hadis yang menjadi dasar pemikiran politik Syiah adalah hadis-hadis yang lemah. Teori dasar tersebut tidak lebih dari pandangan segelintir pakar hukum Syiah sehingga sebetulnya masih bisa dipersoalkan keabsahannya. Sudah barang tentu rejim Iran yang dikuasai kalangan ulama konservatif sangat tersinggung oleh pendapat mereka. Kadivar memang akhirnya dijebloskan ke penjara selama beberapa bulan karena pandangan-pandangannya yang mereka pandangan-pandangannya yang mereka pandang sangat liberal dan menyentuh kesakralan *Vilayat-I Faqih*. Senior kadivar, Ayatollah Montazeri, yang baru saja dibebaskan dari tahanan rumah selama lima tahun pada bulan Januari 2003, juga terus menghimbau para mullah di pemerintahan agar bersikap lebih luwes terhadap reformis. Sikap garang yang diperlihatkan rejim terhadap pemikiran-pemikiran reformis memang kemudian mempengaruhi metode mereka dalam mendorong pertumbuhan demokrasi di Iran. mereka kemudian lebih banyak mengembangkan dialog dan mendukung pencalonan Khatami sebagai presiden pada tahun 1997.

► Kaum Wanita

Sejak dekade 90-an, gerakan wanita di Iran mulai menuai hasilnya. Wanita Iran yang di masa Shah Reza terbelah menjadi wanita perkotaan di kawasan utara yang kaya dan wanita selatan yang cenderung kolot kini mulai memasuki era perubahan. Mereka cenderung melupakan sebutan-sebutan tersebut dan mulai memikirkan cara untuk meningkatkan partisipasi politik mereka. Salah seorang tokoh tekemuka adalah putrid mantan presiden Rafsanjani, Vaezeh Hashemi. Sebagai anggota majelis Iran (1996-2000), Hashemi berjuang keras untuk membela hak-hak wanita di Iran. kini para penggerak organisasi wanita menjadi salah satu ujung tombak perubahan dan masa depan demokarasi Iran.

Sudah diketahui pada bab-bab sebelumnya dimana keberhasilan Khatami memperoleh kedudukan sebagai presiden Republik Islam Iran karena tiga faktor tersebut diatas, Khatami mengerti benar untuk mengambil peluang dengan memanfaatkan keadaan Iran yang memang membutuhkan perubahan bagi kalangan-kalangan yang merasa tertindas kemerdekaannya.

Iran, dengan populasi sekitar 65.620.000 jiwa (1997); mayoritas Islam Sunni (93%). Termasuk negara yang berpengaruh di Timur Tengah dan juga di Asia Tengah. 73% penduduknya berada dibawah usia 37 tahun¹⁸. Dengan struktur usia ;¹⁹

¹⁸ Sumber: P.D. Timotius edisi Desember 2002, dan Operation World, dalam http://www.sabda.org/misi/asia_isi.php?id=12

¹⁹ dari www.cia.gov tahun 1997

kebijakan adalah berdasar kehendak Tuhan yang disampaikan melalui seorang *Rahbar*, bukan dari rakyat.

Memandang lingkup kekuasaan kubu konservatif yang sangat Dominan, menjadikan kubu yang berseberangan begitu juga Khatami harus menghadapi hambatan yang serius untuk merealisasikan kebijakan-kebijakannya, karena mendapat banyak tentangan dari kubu konservatif. Jika Kubu kubu reformis tetap menggunakan arogansinya, hal ini dianggap melecehkan kubu konservatif, sehingga bisa saja kubu konservatif menggunakan intitusi-intitusi politik yang dikuasainya seperti lembaga peradilan, Dewan Garda, aparat Keamanan dan Dinas Intelegensi untuk mengganyam program-program kubu reformis.

Kemudian hal tersebutlah yang memaksa Khatami mau tidak mau harus mengambil jalan tengah dengan bersikap akomodatif terhadap kubu konservatif, sehingga ia akan tetap menjalankan proyek-proyek demokrasiya namun dengan batasan yang tegas dari lembaga *Vilayat-I faqih*.

Dengan rasa nasionalisme tinggi berusaha mewujudkan keinginan Demokrasi bangsanya sebagai tuntutan rakyat juga tuntutan zaman, khatami berusaha terus berjalan dengan berbagai proyek demokrasiya tanpa menanggalkan identitas asli Iran sebagai bangsa Persia yang beridiology Syi'ah yang kemudian dimodivikasi pendahulunya Khomeini yaitu *Vilayat-I Faqih*.

Faktor-faktor yang tersebut diatas bisa rangkum dengan menyebutnya sebagai 'faktor-faktor keseimbangan', dimana diajarkan dalam Islam 'bahwa

tidaklah baik bila sesuatu itu berlebih-lebihan'. Dalam menyeimbangkan kehidupan bernegara adalah bila tidak munculnya dominator maupun adanya kaum terpinggir, tetapi yang terpenting adalah menciptakan stabilisator yang mengatur keseimbangan keduanya. Hal tersebutlah yang sebenarnya bisa dikatakan sebagai demokrasi.

Menurut mereka, Konstitusi Republik Islam Iran khususnya pasal-pasal 1, 2, 3, 59 dan 62 mencerminkan bahwa di satu sisi Iran menganggap Tuhan sebagai penguasa mutlak yang semua perintahnya harus diikuti, sedangkan di sisi lain, memandang perlunya partisipasi rakyat di bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Mereka mengkombinasikan apa yang disebut sebagai 'kriteria Islam' dan demokrasi. Bagi Khatami terwujudnya sebuah Demokratisasi dinegara Iran memang sebuah keharusan tanpa menjadikan sistem yang masih baru ini serasa mengkhianati doktrin atau konstitusi mereka yaitu *Vilayat-I Faqih*.